

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
Skripsi, 26 Juli 2022

KHOFIFAH KETIARA

*COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI  
KABUPATEN BEKASI

XVII + 114 Halaman + 9 Tabel + 4 Lampiran

**ABSTRAK**

Kondisi astronomis Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki curah hujan yang tinggi. Selama lima tahun kuantitas terjadinya bencana banjir semakin meningkat, salah satunya Kabupaten Bekasi yang wilayahnya termasuk rawan banjir yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya untuk menanggulangnya, namun pemerintah menyadari jika dalam penanggulangan banjir ini tidak bisa bekerja sendirian maka pemerintah mengajak pemangku kepentingan lain untuk ikut berkolaborasi dalam hal ini antara lain pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang menggunakan pisau analisis dari Ansell dan Gash (2007) dengan empat dimensi, yakni kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, teknik observasi dan telaah dokumen yang diuji keabsahan datanya menggunakan cara triangulasi sumber data yang berfungsi untuk memanfaatkan sumber yang berbeda untuk menemukan data sejenis. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan jika kolaborasi yang dilakukan belum optimal. Dimana pada dimensi pertama kolaboratif adalah kondisi awal menunjukkan bahwa jika ada insentif untuk berpartisipasi antar pemangku kepentingan, namun ada ketidakseimbangan sumberdaya dalam penanggulangan bencana banjir. Dimensi kedua dalam kolaboratif ini adalah kepemimpinan fasilitatif dimana menunjukkan bahwasanya peran dari pemimpin yang belum luas untuk mendukung terjadinya kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir ini serta masyarakat belum mengetahui peran dalam program kolaboratif ini. Dimensi ketiga, desain kelembagaan yang menunjukkan bahwasanya terdapat aturan dasar dalam program kolaboratif ini. Namun, belum ada aturan teknis yang mengatur mengenai program kolaboratif penanggulangan bencana banjir untuk seluruh *stakeholders*, dan belum adanya ruang untuk masyarakat berpartisipasi secara luas. Dalam dimensi proses kolaboratif ini, terdapat hambatan yaitu, belum ada forum khusus yang membahas penanggulangan bencana banjir.

**Kata Kunci : Bencana Banjir, Collaborative Governance**

Referensi : 15 Buku (1992-2020) + 8 Jurnal (2006-2021)

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES  
PUBLIC ADMINISTRATION STUDY PROGRAM

Thesis, 26 July 2022

KHOFIFAH KETIARA

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN FLOOD DISASTER MANAGEMENT IN THE  
BEKASI REGENCY

XVII + 114 Pages + 9 Table + 4 Attachment

**ABSTRACT**

*Indonesia's astronomical conditions make Indonesia a country that has high rainfall. Over the past five years, the quantity of flood disasters has increased, one of which is Bekasi Regency, whose area is prone to flooding caused by many factors. Therefore, the government is making efforts to overcome it, but the government realizes that if flood control cannot work alone, the government invites other stakeholders to collaborate in this matter including local governments, communities, and the private sector. The purpose of this study is to analyze collaborative governance in flood disaster management in Bekasi Regency. This research uses a qualitative method that result in descriptive data using an analytical knife from Ansell and Gash (2007) with four dimensions, namely initial conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaboration processes. This research was conducted using in-depth interview techniques, observation techniques and document review which tested the validity of the data using triangulation of data sources which functioned to utilize different sources to find similar data. The results of this study revealed that the collaboration was not optimal. Where in the first collaborative dimension is the initial condition indicating that if there is an incentive to participate among stakeholders, there is an imbalance of resources in flood disaster management. The second dimension in this collaboration is facilitative leadership which shows that the role of leaders is not yet broad to support collaborative events in flood disaster management and the community does not yet know the role in this collaborative program. The third dimension is an institutional design which shows that there are basic rules in this collaborative program. However, there are no technical regulations governing collaborative flood disaster management programs for all stakeholders, and there is no room for the public to participate widely. In the dimensions of this collaborative process, there are obstacles, namely, there is no special forum that discusses flood disaster management.*

**Keyword : Collaborative Governance, Floods**

Reference : 15 Books (1992-2020) + 8 Journal (2006-2021)